



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 100 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA KECAMATAN MALANGBONG TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Malangbong Tahun 2023;
  - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Malangbong Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN MALANGBONG TAHUN 2023.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II****SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

**Pasal 3**

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**

**TAHUN 2022 NOMOR 100**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 100 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA** **KERJA**  
**KECAMATAN** **MALANGBONG**  
**TAHUN 2023**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.

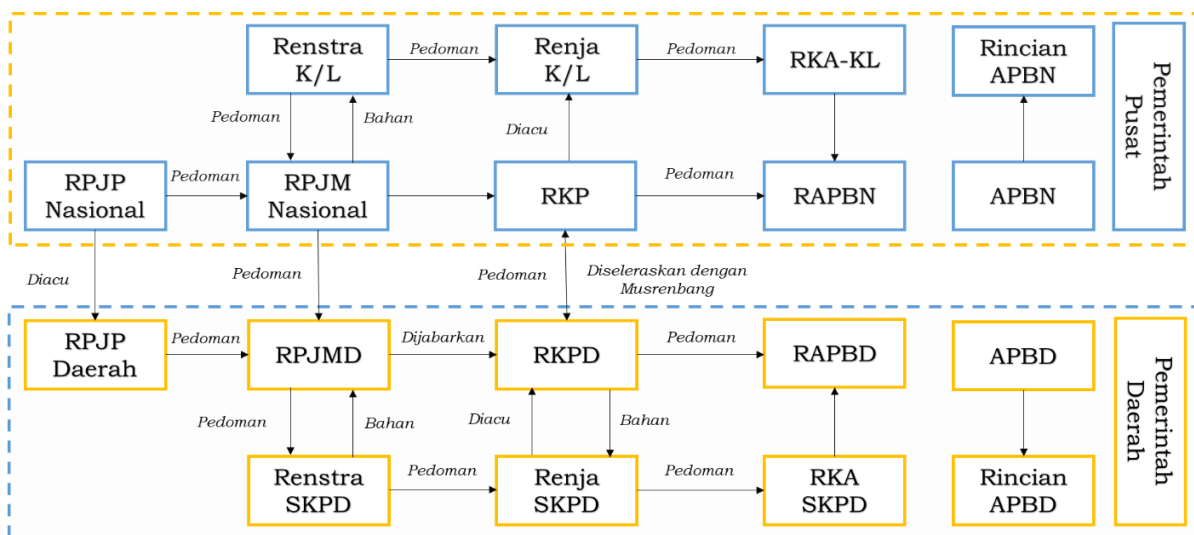
Renja SKPD/Kecamatanenja SKPD/Kecamatan Malangbong Tahun 2023 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal RenjaRenja, penyusunan rancangan Renja, perumusan



rancangan akhir Renja. Sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

**Gambar 1**

**Hubungan Antara Renja Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain**



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Renja SKPD/Kecamatan Malangbong Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling member masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah. Renja SKPD/Kecamatan Malangbong Tahun 2023 juga berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya. Bahwa Renja SKPD/Kecamatan Malangbong merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga

memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran. Sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat kerja daerah, Rencana kerja diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), sesuai atau relevan (*Relevant*), dan tepat waktu (*Time-bound*). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Renja SKPD/Kecamatan Malangbong Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menghadapi tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, penyebaran pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia, dan hingga saat ini masih terdapat tanda-tanda penyebarannya. Pandemi COVID-19 tahun 2021 sudah terkendali pada level yang rendah, diharapkan mulai bisa lepas dari tekanan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 difokuskan pada upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanggulangan pandemi COVID-19 secara komprehensif. Penyusunan RKPD Tahun 2023 memuat pula gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*) pasca COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya mencegah lonjakan kasus di masa depan. Masa epidemi saat ini telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi. Pandemi bukan hanya ujian, tetapi juga peluang baru. Asumsi yang digunakan dalam pembangunan daerah tahun 2023 yaitu:

- a. Masyarakat diharapkan sudah dapat hidup berdampingan dengan COVID-19 seiring dengan adanya vaksin, serta terbentuknya *herd-immunity*.
- b. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli.
- c. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal, serta upaya pemulihan ekonomi nasional sudah berjalan dengan baik, termasuk sudah kembali berjalannya proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

- d. Seluruh aktivitas masyarakat sudah berjalan normal namun tetap menerapkan protokol kesehatan pada semua lini (new normal).

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”. Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan pelimpahan delegasi tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
12. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
13. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
14. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang terintegrasi dan bersinergi pada

setiap lapis pelaku pembangunan. Sejalan dengan it untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan setiap tahun nya maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 86 Tahun 2017 RKPD Tahun 2023, proses penyusunan Renja Kabupaten Garut Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan dan di tentukan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu " Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan daya saing daerah serta Penguatan Demokrasi untuk kesejahteraan Masyarakat" yang di turunkan ke dalam Program dalam Rencana Kerja SKPD/Kecamatan Malangbong Tahun 2023 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Garut dan penjabaran tahun keempat dari rencana pembangunan jangka menengah, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD/Kecamatan dan sebagai bahan penyusunan RKPD/Renja Kabupaten Garut.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut dimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Malangbong tahun 2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau

- dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah



- Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
  29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
  30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

## **1. Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Malangbong tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Malangbong guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Malangbong tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Malangbong ;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Malangbong Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

##### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

##### 1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud: Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan: Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

##### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Malangbong sudah disahkan.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

### **BAB III Tujuan dan Sasaran.**

#### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.**

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## **LAMPIRAN**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Malangbong. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Malangbong ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Malangbong selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Malangbong Tahun 2021 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan yaitu :
  - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;  
Sub Kegiatan :
    - 1.1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;  
Sub Kegiatan :
    - 1.1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 1.2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;  
1.1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
  - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;  
1.1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
1.2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 1.3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 1.4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - 1.5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 1.6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 1.7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    - 1.1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    - 1.1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 1.2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 1.3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 

Sub Kegiatan :

    - 1.1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 1.2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan, Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.
    - 1.3) Pemeliharaan/Rhabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan, dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 

Sub Kegiatan :

    - 1.1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
 

Sub Kegiatan :

    - 1.1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
    - 1.2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;  
Sub Kegiatan :
  - 1.1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
  - 1.2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
  - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;  
Sub Kegiatan :
    - 1.1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1(satu) yaitu :
  - 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;  
Sub Kegiatan :
    - 1.1) Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang Undangan.
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
  - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;  
Sub Kegiatan :
    - 1.1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
  - 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;  
Sub Kegiatan :

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Malangbong 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.



## **2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan**

### **2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu ( TA 2021 )**

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Perangkat Daerah Kecamatan Malangbong dalam pelaksanaan Renja 2021 terdapat 6 Program 13 Kegiatan 14 Sub Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi, antara lain :
  - a. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Perencanaan penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah prosentase realisasi keuangan 99,72 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 56.444.000,- terealisasi Rp. 56.289.400,-
  - b. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Administrasi keuanagn perangkat Daerah Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN prosentase realisasi keuangan 93,97 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 2.194.174.429,- terealisasi Rp. 2.061.881.772 ,-
  - c. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Administrasi kepegawaian perangkat Daerah. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya prosentase realisasi keuangan 99,99 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 10.403.200,- terealisasi Rp. 10.403.000,-
  - d. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Administrasi Umum Perangkat daerah. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor prosentase realisasi keuangan 99,97 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 5.585.300,- terealisasi Rp. 5.583.500,-
  - e. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Administrasi Umum Perangkat daerah. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor prosentase realisasi keuangan 95,97 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 93.331.949,- terealisasi Rp. 93.170.900,-
  - f. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Administrasi Umum Perangkat daerah. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga prosentase realisasi keuangan 99,99 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 8.901.600,- terealisasi Rp. 8.901.000,-
  - g. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan prosentase realisasi keuangan 94,22 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 39.692.000,-

- teralisasi Rp. 37.400.000,-
- h. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor prosentase realisasi keuangan 99,99 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 20.440.200,- terealisasi Rp. 20.440.000,-
  - i. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan prosentase realisasi keuangan 83,09 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 19.998.100,- terealisasi Rp. 16.618.200,-
  - j. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan prosentase realisasi keuangan 99,86 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 17.019.600,- terealisasi Rp. 16.997.100,-
  - k. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 97,99 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 246.181.350,- terealisasi Rp. 241.253.150,-
  - l. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan prosentase realisasi keuangan 95,80 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 137.567.700,- terealisasi Rp. 131.792.700,-
  - m. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan prosentase realisasi keuangan 99,90 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 53.113.000,- terealisasi Rp. 53.083.000,-
  - n. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan prosentase realisasi keuangan 99,95 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp.

200.068.300,- terealisasi Rp. 199.986.700,-

- o. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang undangan prosentase realisasi keuangan 98,72 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 17.279.900,- terealisasi Rp. 17.059.900,-

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Tahun Anggaran 2021**

No	Nama Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
<b>1.</b>	<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota</b>	<b>2.687.511.178</b>	<b>3.225.814.122</b>	<b>95,46</b>
<b>A</b>	<b>Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>56.444.000</b>	<b>56.289.400</b>	<b>99,77</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.444.000	56.289.400	99,77
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat</b>	<b>2.194.174429</b>	<b>2.061881.772</b>	<b>93,97</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.194.174429	2.061881.772	93,97
<b>C</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>10.403.200</b>	<b>10.403.000</b>	<b>99,99</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.403.200	10.403.000	99,99
<b>D</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>139.367.807</b>	<b>63.732.500</b>	<b>45,72</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.585.300	5.583.500	99,97
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.331.949	93.170.900	95,97
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.901.600	8.901.000	99,99
<b>E</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.937.700.400</b>	<b>66.000.000</b>	<b>3,41</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.692.000	37.400.000	94,22
<b>F</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>57.770.500</b>	<b>23.905.000</b>	<b>41,38</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.440.200	20.440.000	99,99
<b>G</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>126.417.700</b>	<b>12.188.700</b>	<b>16,55</b>

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.998.100	16.618.200	83,09
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.019.600	16.997.100	99,89
<b>2.</b>	<b>Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>383.749.050</b>	<b>373.045.850</b>	<b>97,21</b>
<b>A</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>246.181.350</b>	<b>241.253.150</b>	<b>97,99</b>
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	246.181.350	241.253.150	97,99
<b>B</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>137.567.700</b>	<b>131.792.700</b>	<b>95,80</b>
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	137.567.700	131.792.700	95,80
<b>3</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>37.433.000</b>	<b>37.433.000</b>	<b>100</b>
<b>4.</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>53.133.000</b>	<b>53.083.000</b>	<b>99,90</b>
<b>A</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>53.133.000</b>	<b>53.083.000</b>	<b>99,90</b>
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	53.133.000	53.083.000	99,90
<b>5.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>200.068.300</b>	<b>199.986.700</b>	<b>99,95</b>
<b>A</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>200.068.300</b>	<b>199.986.700</b>	<b>99,95</b>
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	200.068.300	199.986.700	99,95
<b>6.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>17.279.900</b>	<b>17.059.900</b>	<b>98,72</b>
<b>A</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>17.279.900</b>	<b>17.059.900</b>	<b>98,72</b>

Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	17.279.900	17.059.900	98,72
---	------------	------------	-------

Sumber : Pengolahan data Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Malangbong tahun anggaran 2021.

Tercapainya kinerja itu ditunjang oleh sumber daya manusia, waktu dan biaya, sementara sumber daya biaya / anggaran yang disetujui oleh TAPD terjadi efisiensi karena situasi dan kondisi pemerintahan di Kabupaten Garut anggaran lebih difokuskan pada penanganan covid-19. Efisiensi anggaran tentunya berdampak pada tidak tercapainya target kinerja tahun 2021.

3) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan Pada Perangkat Daerah Kecamatan

Malangbong dalam pelaksanaan Renja 2021 Program/Kegiatan yang telah

memenuhi target kinerja hasil/keluaran, antara lain :

- a. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Administrasi keuangan perangkat Daerah. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 5.925.000,- terealisasi Rp. 5.925.000,-
- b. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Administrasi Umum Perangkat daerah. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 24.813.600,- terealisasi Rp. 24.813.600,-
- c. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Administrasi Umum Perangkat daerah. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 6.712.200,- terealisasi Rp. 6.712.200,-
- d. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Administrasi Umum Perangkat daerah. Fasilitasi Kunjungan Tamu prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 31.200.000,- terealisasi Rp. 31.200.000,-
- e. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Administrasi Umum Perangkat daerah. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

- dan Konsultasi SKPD prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 33.140.000,- terealisasi Rp. 33.140.000,-
- f. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 18.000.000,- terealisasi Rp. 18.000.000,-
  - g. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 8.330.000,- terealisasi Rp. 8.330.000,-
  - h. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 89.400.000,- terealisasi Rp. 89.400.000,-
  - i. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa di Wilayah Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 11.552.500,- terealisasi Rp. 11.552.500,-
  - j. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan. Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 25.880.500,- terealisasi Rp. 25.880.500,-

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

**Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja  
Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Nama Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>I</b>	<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota</b>	<b>216.253.300</b>	<b>216.253.300</b>	<b>100</b>
<b>a</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat</b>	<b>4.657.500</b>	<b>4.657.500</b>	<b>100</b>
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.657.500	4.657.500	100
<b>b</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>95.865.800</b>	<b>95.865.800</b>	<b>100</b>
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.813.600	24.813.600	100
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6.712.200	6.712.200	100
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.200.000	31.200.000	100
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.140.000	33.140.000	100
<b>c</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>26.330.000</b>	<b>26.330.000</b>	<b>100</b>
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	18.000.000	100
7	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.330.000	8.330.000	100
<b>d</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>89.400.000</b>	<b>89.400.000</b>	<b>100</b>
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89.400.000	89.400.000	100
<b>II</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>37.433.000</b>	<b>37.433.000</b>	<b>100</b>
<b>a</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>11.552.500</b>	<b>11.552.500</b>	<b>100</b>

9	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa di Wilayah Kecamatan	11.552.500	11.552.500	100
b	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>25.880.500</b>	<b>25.880.500</b>	<b>100</b>
10	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	25.880.500	25.880.500	100

Sumber: Pengolahan data Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Malangbong tahun anggaran 2021.

### **2.1.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan ( TA 2022 )**

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Perangkat Daerah Kecamatan Malangbong dalam pelaksanaan Renja 2022 terdapat 6 Program 14 Kegiatan 30 Sub Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi, antara lain :

- a. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Perencanaan penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah prosentase realisasi keuangan 99,99 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 7.948.500,- terealisasi Rp. 7.948.250,-
- b. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Administrasi keuanagn perangkat Daerah Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN prosentase realisasi keuangan 33,87 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 2.185.478.098,- terealisasi Rp. 740.372.575 ,-
- c. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Administrasi keuanagn perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 4.657.500,- terealisasi Rp. 4.657.500,-
- d. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Administrasi kepegawaian perangkat Daerah. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya prosentase realisasi keuangan 35,36 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 17.652.800,- terealisasi Rp. 6.243.200,-
- e. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Administrasi Umum Perangkat daerah. Penyediaan Komponen Instalasi



- Listrik/Penerangan Bangunan Kantor prosentase realisasi keuangan 51,30 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 5.602.300,- terealisasi Rp. 2.874.300,-
- f. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Administrasi Umum Perangkat daerah. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor prosentase realisasi keuangan 49,60 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 52.358.500,- terealisasi Rp. 26.385.900,-
- g. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Administrasi Umum Perangkat daerah. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga prosentase realisasi keuangan 75,05 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 7.834.507,- terealisasi Rp. 1.954.507,-
- h. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Administrasi Umum Perangkat daerah. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan prosentase realisasi keuangan 25 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 9.502.500,- terealisasi Rp. 7.126.900,-
- i. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Administrasi Umum Perangkat daerah. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan prosentase realisasi keuangan 33,33 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 6.780.000,- terealisasi Rp. 2.260.000,
- k. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Administrasi Umum Perangkat daerah. Fasilitas Kunjungan Tamu prosentase realisasi keuangan 33,33 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 13.500.000,- terealisasi Rp. 4.500.000,-
- l. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Administrasi Umum Perangkat daerah. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD prosentase realisasi keuangan 33,18 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 43.790.000,- terealisasi Rp. 14.530.000,-
- m. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya prosentase realisasi keuangan 0 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 34.230.800,- terealisasi Rp. 0,-
- n. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya prosentase realisasi keuangan 13 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 1.903.469.600,- terealisasi Rp. 2.475.000,-
- o. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik prosentase realisasi keuangan

- 33,33 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 18.000.000,- terealisasi Rp. 6.000.000,-
- p. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor prosentase realisasi keuangan 41,00 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 9.670.000,- terealisasi Rp. 3.965.000,-
- q. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor prosentase realisasi keuangan 34,68 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 30.100.500,- terealisasi Rp. 10.440.000,-
- r. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan prosentase realisasi keuangan 22,09 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 15.276.050,- terealisasi Rp. 3.375.400,-
- s. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan prosentase realisasi keuangan 12,13 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 17.833.850,- terealisasi Rp. 2.163.600,-
- t. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya prosentase realisasi keuangan 00 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 40.500.000,- terealisasi Rp. 40.500.000,-
- u. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 30,63 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 91.038.300,- terealisasi Rp. 27.892.900,-
- v. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan prosentase realisasi keuangan 54,59 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 10.330.000,- terealisasi Rp.

5.640.000,-

- w. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan prosentase realisasi keuangan 33,16 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 125.003.400,- terealisasi Rp. 41.455.600,-
- x. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan prosentase realisasi keuangan 41,10 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 10.697.600,- terealisasi Rp. 4.397.600,-
- y. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan prosentase realisasi keuangan 31 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 61.726.000,- terealisasi Rp. 19.146.000,-
- z. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia prosentase realisasi keuangan 29 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 11.237.600,- terealisasi Rp. 3.260.000,-
- aa. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia prosentase realisasi keuangan 10,66 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 21.104.500,- terealisasi Rp. 2.250.000,-
- aaa. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan prosentase

realisasi keuangan 28,48 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 200.000.000,- terealisasi Rp. 56.970.000,-

aaaa. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 12.344.000,- terealisasi Rp. 12.344.000,-

aaaaa. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan prosentase realisasi keuangan 0 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 10.159.400,- terealisasi Rp. 10.159.400,-

aaaaaa. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif prosentase realisasi keuangan 66,57 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 10.096.500,- terealisasi Rp. 6.721.500,-

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentas
1.	<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota</b>	<b>4.424.185.505</b>	<b>1.081.573.071</b>	<b>24,44</b>
A	<b>Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7.948.500</b>	<b>7.948.250</b>	<b>99,99</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.948.500	7.948.250	99,99
B	<b>Administrasi Keuangan Perangkat</b>	<b>2.185.478.098</b>	896.897.921	41,03
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.185.478.098	896.897.921	41,03
C	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>17.652.800</b>	<b>6.243.200</b>	<b>35,36</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17.652.800	6.243.200	35,36
D	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>139.367.807</b>	<b>63.732.500</b>	<b>45,72</b>

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.602.300	2.874.300	51,30
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.358.500	25.972.600	49,60
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.834.507	5.880.000	75,05
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.502.500	2.375.600	25,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6.780.000	2.8250.000	41,66
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000	5.625.000	5,62
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.790.000	18.180.000	41,51
<b>E</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.937.700.400</b>	<b>66.000.000</b>	<b>3,41</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.230.800	0	00,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1.903.469.600	66.000.000	3,46
<b>F</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>57.770.500</b>	<b>23.905.000</b>	<b>41,38</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	7.500.000	41,66
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.670.000	3.965.000	41,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.100.500	12.440.000	41,32
<b>G</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>73.609.900</b>	<b>12.188.700</b>	<b>16,55</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.276.050	4.368.100	29,59
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.833.850	7.820.600	43,85
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.500.000	0	00,00
<b>2.</b>	<b>Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>226.368.700</b>	<b>95.752.900</b>	<b>42,29</b>
<b>A</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>91.038.300</b>	35.624.000	39,13
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	91.038.300	35.624.000	39,13

B	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>135.330.400</b>	<b>60.128.100</b>	<b>44,43</b>
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.330.000	6.900.000	66,79
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	125.003.400	53.228.100	42,58
<b>3</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>10.697.600</b>	<b>4.397.600</b>	<b>41,10</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemerdayaan Desa</b>	<b>10.697.600</b>	<b>4.397.600</b>	<b>41,10</b>
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.697.600	4.397.600	41,10
<b>4.</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>72.963.600</b>	<b>29.651.000</b>	<b>40.6</b>
<b>A</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>61.726.000</b>	<b>24.766.000</b>	<b>40.1</b>
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	61.726.000	24.766.000	40.1
B	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala</b>	<b>11.237.600</b>	<b>4.885.000</b>	<b>43.4</b>
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	11.237.600	4.885.000	43.4
<b>5.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>			
<b>A</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>221.104.500</b>	<b>83.045.000</b>	<b>37,55</b>
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21.104.500	6.750.000	31,98
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	200.000.000	76.295.000	38,47

6.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	32.599.900	22.752.000	69,79
A	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	32.599.900	22.752.000	69,79
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	10.159.400	3.686.500	36,29
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.096.500	6.721.500	66,57

Sumber: Pengolahan data Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Malangbong tahun anggaran 2022.

- 4) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Perangkat Daerah Kecamatan Malangbong dalam pelaksanaan Renja 2022 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, antara lain :
- a. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Administrasi keuangan perangkat Daerah. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 4.657.500,- terealisasi Rp. 4.657.500,-
  - b. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2022 Rp. 12.344.000,- terealisasi Rp. 12.344.000,-

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.4****Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Kegiatan	Tahun 2022		
		Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.657.500	4.657.500	100
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.344.000	12.344.000	100

Sumber: Pengolahan data Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Malangbong tahun anggaran 2022.

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun anggaran 2022, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2022 Perangkat Daerah Kecamatan Malangbong
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan  
Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :
  - a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, ada anggaran yang tidak terserap karena salah kode rekening;
  - b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
  - c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah  
Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Malangbong adalah sebagai berikut :



- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Malangbong tahun 2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Malangbong pada umumnya.
  - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Malangbong berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Malangbong .
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
  - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

### **2.1.1 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu**





Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Malangbong merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Malangbong selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.

Adapun capaian Renstra Kecamatan Malangbong tahun lalu (tahun 2021) seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.5**  
**Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kete
a	B	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	1.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	Triwulan 1				
						Triwulan 2	82	90,74	110,66	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	82	82,39	100,47	
						Kondisi Akhir (F)		86,56	105,57	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Tingkat Kecamatan	2.1	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	7,87	Triwulan 1				
						Triwulan 2	7,87	7,87	100.00	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4				
						Kondisi Akhir (F)		100	100.00	
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	3.1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Person	80	2 Triwulan	80	90,05	112,56	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	4.1	Nilai Predikat SAKIP	Nilai/Predikat	B	Triwulan 2	B	B	100	

**Keterangan**





Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Sumber : Dari penilaian Survei Kepuasan Masyarakat dan hasil monitoring para kasi ke Desa dan laporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021.

**Tabel 2.6**  
**Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tahun 2022 SEMESTER II**

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kete
a	B	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	1.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	Triwulan 1				
						Triwulan 2	82	88.85	111.06	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4				
						Kondisi Akhir (F)		88.85	111.06	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Tingkat Kecamatan	2.1	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	7,87	Triwulan 1				
						Triwulan 2	7,87	7,87	100.00	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4				
						Kondisi Akhir (F)		100	100.00	
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	3.1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	80	Triwulan 2	80	90,05	112,56	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	4.1	Nilai Predikat SAKIP	Nilai/Predikat	B	Triwulan 2	B	-	50	

**Keterangan**

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Sumber : Dari penilaian Survei Kepuasan Masyarakat dan hasil monitoring parakasi ke Desa.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja Kecamatan Malangbong tahun 2021, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Sasaran dan Indikator kinerja yang mencapai target 100% sebanyak 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Tingkat Kecamatan dengan indikator kinerja Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dan Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan indikator kinerja Nilai Predikat SAKIP .
3. Sasaran dan Indikator kinerja yang melebihi target 100% ada 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan dengan Indikator Sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya 111,06 % dan Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dari target 100% pencapaiannya sampai 112, 56%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;  
Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga triwulan ke 2 anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 pada tahun ke 3 pelaksanaan Renstra Kecamatan Malangbong . Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2020-2021 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu

adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Malangbong selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

**Tabel 2.7**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022  
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Malangbong

Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7		Urusan Wajib												
7	01	Bidang Urusan Pemerintahan												
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	94,70%	100%	98,26%	98,26%	100%	100%			
7	01	01	2,01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan</b>									
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	100%	99,77%	100%	99,77%	99,77%	100%	100%	
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%

						Dokumen RKA-SKPD													
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%					
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%					
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%					
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%					
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	93,97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan Keuangan	100%	100%	100%	99,30%	99,30%	100%	100%	100%					

					SKPD	Akhir Tahun									
7	01	01	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	99,99%	100%	99,97%	99,97%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<b>100%</b>	<b>99,99%</b>	<b>100%</b>	<b>96,97%</b>	<b>96,97%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7	01	01	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	96,56%	100%	96,56%	96,56%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	99,97%	100%	99,76%	99,76%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat tulis kantor ( ATK ) peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	100%	95,97%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis penyediaan peralatan rumah tangga	100%	99,99%	100%	99,60%	99,60%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetak dan penggandaan	100%	100%	100%	95,05%	95,05%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar sesuai kebutuhan	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>98,85%</b>	<b>98,85%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi kunjungan tamu	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%



						Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD									
7	01	01	2,07			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pelaporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	94,22%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2,07	05	pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang di sediakan	100%	0%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	100%	0%	100%	90,63%	90,63%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas Tanah Untuk Bangunan Polek dan Koramil, Jumlah unit Gedung Kantor kecamatan, Luas tanah untuk kantor	100%	0%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2,07	0	Pengadaan Tanah untuk lahan parkir	Luas tanah untuk Lahan parker pasilitasi kenyamanan pelayanan Masyarakat	100%	0%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	100%	0%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2,08			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%

7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	99,99%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan Dinas Jabatan	100%	83,09%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	01	2,09	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	99,89%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang memadai	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase Fasilitasi kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh kecamatan</b>	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	2,01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan</b>	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%

						<b>kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan</b>														
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan monitoring BPNT, fasilitasi kegiatan keagamaan, fasilitasi kegiatan olahraga, penanggulangan covid dan monitoring kegiatan ODF	100%	97,99%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	2,02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Prosentase pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilakukan di Kecamatan	100%	0%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengelolaan sampah di Kecamatan	100%	95,80%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan</b>	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7	01	03	2,01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Laporan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa</b>	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	2,01	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa	Jumlah Dokumen partisipasi masyarakat dalam Forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

7	01	03	2,01	02	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan monitoring/evaluasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%
					Pembinaan Penangann Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penangann Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan</b>	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	04	2,01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	100%	99,90%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	100%	0%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	04	2,02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Penegakan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan</b>	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pelaksanaan patroli dalam rangka pnegakan perda/perkada	100%	0%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%

					dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	05	2,01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100%	0%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah rapat sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100%	0%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	99,95%	100%	99,95%	99,95%	100%	100%	100%
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Prosentase penyelenggaraan tugas pemerintahan Umum tingkat kecamatan</b>	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	06	2,01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi</b>	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%

						<b>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>								
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pelaksanaan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	100%	0%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	06	2,01	04	Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumentasi Fasilitasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan	100%	98,97%	100%	98,97%	98,97%	100%	100%	100%
7	01	06	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumentasi Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100%	0%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga masyarakat tingkat kecamatan	100%	0%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen RPTK	100%	0%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%

Sumber: Pengolahan data Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Malangbong tahun anggaran 2020, 2021, tahun berjalan 2022 dan perkiraan Rencana Kerja tahun 2023

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Malangbong sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel **2.8** sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Malangbong**  
**Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut**

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2022		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			81,30	82	82,20	82,92	81,30	82	82,20	82,92	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			7,8	7,87	7,88	7,9	7,8	7,87	7,88	7,9	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			75%	80%	85%	90%	75%	80%	85%	90%	
4	Predikat SAKIP Kecamatan			CC	B	B	BB	CC	B	B	BB	

Sumber : Dari pengolahan Rencana Strategis Kecamatan Malangbong hasil perhitungan dan survai para Kasi di lapangan



### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian Ibu;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Malangbong ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

#### **1) Pemanfaatan**

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

#### **2) Optimalisasi**

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial*

*Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

### **3) Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

### **4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Malangbong serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wilayah Kecamatan Malangbong (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan

penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Malangbong berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Malangbong sebesar Rp. 9.738.351.729,00.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Malangbong diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2023 Kecamatan Malangbong mengusulkan 6 (enam) Program dengan 14 (empat belas) kegiatan dan 45 (Empat puluh lima) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Malangbong mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel **2.9** sebagai berikut :

**Tabel 2.9**  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Malangbong

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					
7	01				9.568.351.729,00	<b>KECAMATAN</b>					9.568.351.729,00
7	01	01			8.520.068.890,50	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	8.520.068.890,50	
7	01	01	2,01		13.797.240,00	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan</b>	100%	13.797.240,00	
7	01	01	2,01	01	7.797.240,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Malangbong	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	7.797.240,00	
7	01	01	2,01	02	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Malangbong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil	1 Dokumen	1.000.000	

							Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Malangbong	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Malangbong	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000										
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Malangbong	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Malangbong	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000										
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Malangbong	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Malangbong	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000										
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaiann Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Malangbong	Jumlah Laporan Capaiann Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil	1 Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaiann Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Malangbong	Jumlah Laporan Capaiann Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi	1 Laporan	1.000.000										

						Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Malangbong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Malangbong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000	
7	01	01	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	2.451.513.352,20	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	2.451.513.352,20	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Malangbong	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	2.444.344.102,20	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Malangbong	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	2.444.344.102,20	
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Malangbong	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	7.169.250,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Malangbong	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	7.169.250,00	
7	01	01	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	12.576.872,00	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	12.576.872,00	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Malangbong	Jumlah Stel Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32 Stel	12.576.872,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Malangbong	Jumlah Stel Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32 Stel	12.576.872,00	
7	01	01	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan</b>	100%	277.352.862,3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan</b>	100%	277.352.862,3	

						<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>0</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>0</b>	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Malangbong	Jumlah Item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 item	6.758.950,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Malangbong	Jumlah Item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 item	6.758.950,00
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Malangbong	Jumlah Alat tulis kantor ( ATK ) peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	2 item	117.771.657,30	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Malangbong	Jumlah Alat tulis kantor ( ATK ) peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	2 item	117.771.657,30
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Malangbong	Jumlah jenis penyediaan peralatan Rumah tangga	13 jenis	10.770.925,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Malangbong	Jumlah jenis penyediaan peralatan Rumah tangga	13 jenis	10.770.925,00
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Malangbong	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 item	29.690.760,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Malangbong	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 item	29.690.760,00
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Malangbong	Jumlah Surat Kabar sesuai kebutuhan	99 exemplar	8.129.220,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Malangbong	Jumlah Surat Kabar sesuai kebutuhan	99 exemplar	8.129.220,00
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Malangbong	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi kunjungan tamu	780 orang	37.752.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Malangbong	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi kunjungan tamu	780 orang	37.752.000,00
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Malangbong	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasidan	252 kali	40.095.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Malangbong	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasidan	252 kali	40.095.000,00

							konsultasi SKPD									konsultasi SKPD								
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 dokumen	26.384.350,00	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 dokumen	26.384.350,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 dokumen	26.384.350,00						
7	01	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah pelaporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah</b>	<b>1 laporan</b>	<b>5.565.131.957,00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah pelaporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah</b>	<b>1 laporan</b>	<b>5.565.131.957,00</b>		<b>Jumlah pelaporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah</b>	<b>1 laporan</b>	<b>5.565.131.957,00</b>						
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Malangbong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	48.017.200,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Malangbong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	48.017.200,00		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	48.017.200,00						
7	01	01	2,07	05	pengadaan Mebel	Kecamatan Malangbong	Jumlah Paket Mebel yang di sediakan	3 unit	309.106.160,00	pengadaan Mebel	Kecamatan Malangbong	Jumlah Paket Mebel yang di sediakan	3 unit	309.106.160,00		Jumlah Paket Mebel yang di sediakan	3 unit	309.106.160,00						
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 unit	37.500.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 unit	37.500.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 unit	37.500.000,00						
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Luas Tanah Untuk Bangunan Polek dan Koramil, Luas tanah untuk kantor	4200 m2 420 m2	4.770.508.597,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Luas Tanah Untuk Bangunan Polek dan Koramil, Luas tanah untuk kantor	4200 m2 420 m2	4.770.508.597,00		Luas Tanah Untuk Bangunan Polek dan Koramil, Luas tanah untuk kantor	4200 m2 420 m2	4.770.508.597,00						



7	01	01	2,07	0	Pengadaan Tanah untuk lahan parkir		Luas tanah untuk Lahan parkir pasilitasi kenyamanan pelayanan Masyarakat	1 Unit	500.000.000,00	Pengadaan Tanah untuk lahan parkir		Luas tanah untuk Lahan parkir pasilitasi kenyamanan pelayanan Masyarakat	1 Unit	500.000.000,00
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Malangbong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1 laporan	400.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Malangbong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1 laporan	400.000.000,00
7	01	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>56.591.942,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>56.591.942,00</b>
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Malangbong	Jumlah pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	36 kali	21.780.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Malangbong	Jumlah pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	36 kali	21.780.000,00
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Malangbong	Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	4 Jenis	10.079.300,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Malangbong	Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	4 Jenis	10.079.300,00
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Malangbong	Jumlah jenis Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28 orang/bulan	24.732.642,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Malangbong	Jumlah jenis Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28 orang/bulan	24.732.642,00

7	01	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	143.104.665,00	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	143.104.665,00
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Malangbong	jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan Dinas Jabatan	14 unit	24.193.345,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Malangbong	jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan Dinas Jabatan	14 unit	24.193.345,00
7	01	01	2,09	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	20.571.320,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	20.571.320,00
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Malangbong	Jumlah Gedung Kantor yang memadai	1 gedung	98.340.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Malangbong	Jumlah Gedung Kantor yang memadai	1 gedung	98.340.000,00
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Prosentase Fasilitasi kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh kecamatan</b>	100%	348.066.420	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Prosentase Fasilitasi kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh kecamatan</b>	100%	348.066.420
7	01	02	2,01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan</b>	1 laporan	193.552.370	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di</b>	1 laporan	193.552.370

							<b>di tingkat Kecamatan</b>					<b>tingkat Kecamatan</b>		
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Malangbong	Jumlah pelaksanaan monitoring BPNT, fasilitasi kegiatan keagamaan, fasilitasi kegiatan olahraga, penanggulangan covid dan monitoring kegiatan ODF	5 kegiatan	318.552.370,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Malangbong	Jumlah pelaksanaan monitoring BPNT, fasilitasi kegiatan keagamaan, fasilitasi kegiatan olahraga, penanggulangan covid dan monitoring kegiatan ODF	5 kegiatan	318.552.370,00
7	01	02	2,02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		<b>Prosentase pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	100%	154.514.050	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		<b>Prosentase pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	100%	154.514.050
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Malangbong	Jumlah penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilakukan di Kecamatan	3 laporan	24.514.050,00	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Malangbong	Jumlah penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilakukan di Kecamatan	3 laporan	24.514.050,00
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah pengelolaan sampah di Kecamatan	12 bulan	175.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah pengelolaan sampah di Kecamatan	12 bulan	175.000.000,00

7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan</b>	100%	84.915.100,00	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan</b>	100%	84.915.100,00	
7	01	03	2,01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Jumlah Laporan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa</b>	1 laporan	84.915.100,00	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Jumlah Laporan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa</b>	1 laporan	84.915.100,00	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Malangbong	Jumlah pelaksanaan monitoring/evaluasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	24 desa	34.915.100,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Malangbong	Jumlah pelaksanaan monitoring/evaluasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	24 desa	34.915.100,00	
					Pembinaan Penangann Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Pembinaan Penangann Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 dokumen	50.000.000,00	Pembinaan Penangann Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Pembinaan Penangann Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 dokumen	50.000.000,00	
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan</b>	100%	104.262.400,00	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan</b>	100%	104.262.400,00	
7	01	04	2,01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman</b>	1 laporan	83.353.930,00	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban</b>	1 laporan	83.353.930,00	

							<b>dan Ketertiban Umum</b>					<b>Umum</b>						
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Malangbong	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	12 kali/bulan	64.653.930,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Malangbong	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	12 kali/bulan	64.653.930,00				
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Malangbong	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1 kali	18.700.000,00	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Malangbong	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1 kali	18.700.000,00				
7	01	04	2,02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		<b>Persentase Penegakan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>20.908.470,00</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		<b>Persentase Penegakan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>20.908.470,00</b>				
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Malangbong	Jumlah pelaksanaan patroli dalam rangka pnegakan perda/perkada	2 kali/tahun	20.908.470,00	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Malangbong	Jumlah pelaksanaan patroli dalam rangka pnegakan perda/perkada	2 kali/tahun	20.908.470,00				
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	<b>100%</b>	<b>320.349.573,50</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		Persentase Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	<b>100%</b>	<b>320.349.573,50</b>				

7	01	05	2,01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	<b>259.640.700</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	<b>259.640.700</b>	
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Malangbong	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	2 kegiatan	23.266.930,50	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Malangbong	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	2 kegiatan	23.266.930,50	
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Malangbong	Jumlah rapat sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	1 tahun	55.000.000,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Malangbong	Jumlah rapat sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	1 tahun	55.000.000,00	
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Malangbong	Jumlah kegiatan forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 kali	242.082.643,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Malangbong	Jumlah kegiatan forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 kali	242.082.643,00	

7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Prosentase penyelenggaraan tugas pemerintahan Umum tingkat kecamatan</b>	100%	190.689.345,00	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Prosentase penyelenggaraan tugas pemerintahan Umum tingkat kecamatan</b>	100%	190.689.345,00
7	01	06	2,01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	1 laporan	190.689.345,00	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	1 laporan	190.689.345,00
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Malangbong	Jumlah pelaksanaan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	3 kegiatan	49.373.940,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Malangbong	Jumlah pelaksanaan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	3 kegiatan	49.373.940,00
7	01	06	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Malangbong	Jumlah Dokumentasi Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 kegiatan	60.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Malangbong	Jumlah Dokumentasi Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 kegiatan	60.000.000,00
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Malangbong	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	1 laporan	31.315.405,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Malangbong	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	1 laporan	31.315.405,00

7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Malangbong	Jumlah dokumen RPTK	1 dokumen	50.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Malangbon g	Jumlah dokumen RPTK	1 dokume n	50.000.000,00	
<b>TOTAL</b>									<b>9.738.351.729 ,00</b>					<b>9.738.351.729 ,00</b>	

Sumber : Pengolahan Data usulan perencanaan anggaran pembangunan Kecamatan Malangbong pada SIPD Tahun Anggaran 2023



## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Malangbong melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Malangbong mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.10**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**  
**Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Malangbong

**Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Malangbong**

<b>NO</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran / Volume</b>	<b>Catatan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar</b>				
1	Pembangunan RKB SDN Bunisari 1	Desa Bunisari	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Pendidikan	150.000.000 / kelas	
2	Pembangunan RKB SDN Bunisari 2	Desa Bunisari	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Pendidikan	150.000.000 / kelas	
3	Rehabilitasi Bangunan MTS Ma'arif II Malangbong	Desa Bunisari	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Pendidikan	150.000.000 / kelas	
4	Pembangunan RKB SDN Barudua 1	Desa Barudua	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Pendidikan	150.000.000 / kelas	
5	Pembangunan RKB SDN Cilampuyang 1	Desa Cilampuyang	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Pendidikan	150.000.000 / kelas	
6	Pembangunan RKB SDN Cibunar 4	Desa Cibunar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Pendidikan	150.000.000 / kelas	

7	Pembangunan RKB SDN Cisitu 1	Desa Cisitu	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Pendidikan	150.000.000 / kelas	
8	Pembangunan RKB SDN Cilampuyang 3	Desa Cilampuyang	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Pendidikan	150.000.000 / kelas	
9	Pembangunan RKB SDN Sekarwangi 1	Desa Sekarwangi	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Pendidikan	150.000.000 / kelas	
10	Pembangunan RKB SDN Lewobaru 1	Desa Lewobaru	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Pendidikan	150.000.000 / kelas	
11	Pembangunan RKB SDN Malangbong 2	Desa Malangbong	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Pendidikan	150.000.000 / kelas	
12	Pembangunan RKB SDN Citeras 3	Desa Citeras	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Pendidikan	150.000.000 / kelas	
13	Pembangunan RKB SDN Mekarasih 5	Desa Mekarasih	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Pendidikan	150.000.000 / kelas	
	<b>Program Peningkatan Kerja sama antar Pemerintah Daerah</b>				
14	Pengadaan Tanah Polek dan Koramil 4200 meter persegi	Kec. Malangbong	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik bebas KKN	4.770.508.597/4200 m	
	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b>				
15	Penataan Alun-alun Malangbong	Kec. Malangbong	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Alun-alun	1.000.000.000 / 1 paket	
	<b>Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan</b>				
16	Pemekaran Kecamatan Malangbong	Kec. Malangbong	Peningkatan Pelayanan Publik	10.000.000.000 / 1 paket	
	<b>Program Infrastruktur</b>				

17	Pembangunan Jalan Penunjang koneksifitas Agrowisata	Kec. Malangbong	Peningkatan Sarana Transfortasi Poros Desa	2.000.000.000 / 2 km	
18	Pembangunan Jembatan Desa Sukajaya-Desa Sekarwangi	Kec. Malangbong	Peningkatan Sarana Transfortasi Kawasan Agrowisata	400.000.000 / 15 m	
19	Pembangunan Jembatan sungai Cimanuk Kec.Selaawi-Kec.Malangbong	Kec. Malangbong	Peningkatan Sarana Transfortasi Antar Kecamatan	15.000.000.000 / 35 m	
20	Pembangunan Trade Center Agrowisata Malangbong	Kec. Malangbong	Peningkatan Sarana Pemasaran Produk Unggulan Desa	300.000.000 / 1 Paket	
21	Pembangunan Jembatan Desa Citeras-Desa Sukaratu 35x3x6m	Kec. Malangbong	Peningkatan Sarana Transfortasi Poros Desa	400.000.000 / 1 Paket	
22	Pembangunan Mess pegawai Kecamatan Malangbong	Kec. Malangbong	Peningkatan Kinerja Pegawai	400.000.000 / 1 Paket	
23	Penataan halaman Kantor Kecamatan Malangbong	Kec. Malangbong	Peningkatan Kinerja Pegawai	250.000.000 / paket	
24	Pembangunan Drainase Jalan Prioritas dan Trotoar Ibu Kota Kecamatan	Kec. Malangbong	Peningkatan Sarana Prasarana ibu kota kecamatan	1.500.000.000 / paket	
25	Pemb. Jembatan Tanjknangsi	Desa Malangbong	Peningkatan Sarana Transfortasi	500.000.000 / 1 paket	
26	Hotmix Jalan Poros Desa (Jalan Kabupaten)	Desa Cinagara – Desa Kutanagara	Peningkatan Sarana Transfortasi	5.000.000.000 / 1 paket	
27	Drainase Jalan Desa RW 05	Desa Kutanagara	Peningkatan Sarana Saluran Air	300.000.000 / 1 paket	
28	Pengaspalan Jalan Usaha Tani Kp. Babakan	Desa Sekarwangi	Peningkatan Sarana Transfortasi	500.000.000 / 1 paket	
29	Pengaspalan Jln Produksi Kp. Caringin -Cisunia	Desa Cibunar	Peningkatan Sarana Transfortasi / Ekonomi	400.000.000 / 1 paket	
30	Penataan Saran Prasarana Pemakaman	Desa Sukarasa	Memperindah Pemakaman	200.000.000 / 1 paket	

31	Pembuatan Embung Desa	Desa Sukamanah	Peningkatan Pengairan Pertanian	600.000.000 / 1 paket	
32	Pengaspalan Jln. Kp. Muncanggajah	Desa Campaka	Peningkatan Sarana Transfortasi	280.000.000 / 1 paket	
33	Pengembangan Objek Wisata Palahlar	Desa Cikarag	Terbentuknya Pemukiman Penduduk yang Bersih dan Sehat	400.000.000 / 1 paket	
34	Pembangunan TPT Cipahoman	Desa Barudua	Terbentuknya Penahanan Tanah yang Kuat	500.000.000 / 1 paket	
35	Pembangunan Embung Kawasan	Desa Karangmulya	Terbentuknya Penampungan Air	250.000.000 / 1 paket	
36	Hotmix Jalan Desa	Desa Sanding – Desa Bunisari	Peningkatan Sarana Transfortasi	1.000.000.000 / 1 paket	
37	TPT-TPT jalan Usaha Tani	Desa Cinagara	Meningkatnya Jalan Pertanian	500.000.000 / 1 paket	
38	Pembangunan Drainase Jalan Desa Kp. Sakawayana	Desa Sakawayana	Peningkatan Sarana Transfortasi Poros Desa	300.000.000 / 1 paket	
39	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Desa Mekarmulya	Peningkatan Sarana Transfortasi	400.000.000 / 1 paket	
40	Rehab Saluran Irigasi	Desa Cihaurkuning	Meningkatnya Produksi Pertanian	500.000.000 / 1 paket	
41	Pemb. Jl.Wisata Manuk Mandi	Desa Cisit	Peningkatan Sarana Transfortasi Pariwisata	500.000.000 / 1 paket	
42	Pengaspalan Jalan Desa	Desa Mekarasih	Peningkatan Sarana Transfortasi	500.000.000 / 1 paket	
43	Hotmix Jalan Desa	Desa Cilampuyang	Peningkatan Sarana Transfortasi	800.000.000 / 1 paket	
44	Pelebaran dan Pengerasan Jalan Blok Rengrang	Desa Sukajaya	Peningkatan Sarana Transfortasi	500.000.000 / 1 paket	

45	Hotmix Jalan Poros Desa	Desa Lewobaru	Peningkatan Sarana Transfortasi	2.000.000.000 / 1 paket
----	-------------------------	---------------	---------------------------------	-------------------------

Sumber : Hasil pengolahan data Musrenbang Kecamatan Malangbong Tahun 2022.

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahkan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahkan Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2023, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;

2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat.**

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Malangbong Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta
4. Membangun komitmen seluruh stekholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.



### 3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Malangbong mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan.
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Malangbong Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Malangbong Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Malangbong Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Malangbong**  
**Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	82,20
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	7,88
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	85%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B

Sumber : Perubahan RPJMD tahun 2019-2024

### **3.3 Program dan Kegiatan Prioritas**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Malangbong merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Malangbong sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan

di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Malangbong diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Malangbong merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Malangbong diimplentasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar,

ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Malangbong. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Malangbong diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Malangbong sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Malangbong melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Malangbong Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 45 (empat puluh lima) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Malangbong sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Malangbong dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 9.568.351.729,-.

Adapun Program Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan

kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Malangbong pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ii. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- iii. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- iv. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- v. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- vi. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- vii. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

- 1.5.2 Pengadaan Mebeler
- 1.5.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 1.5.4 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 1.5.5 Pengadaan Tanah untuk lahan parkir.
- 1.5.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya.
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
    - 1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
    - 1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
      - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
        - 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
      - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
        - 2.2.1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan.
        - 2.2.2 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
  - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan.

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

4.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5.1.2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

5.1.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.



6.1.2 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

6.1.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.

6.1.4 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut**  
**Kecamatan Malangbong**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7	0	<b>KECAMATAN</b>										9.568.351.7		2.965.019.4			
	1											29,00		10			
7	0	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										8.520.068.8		2.264.430.6			
	1											90,50		61			
7	0	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										13.797.240,00		12.912.750			
	1																
7	0	01	2,0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut Malangbong	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	7.797.240,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	8.220.750
7	0	01	2,0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA skpd	Jumlah Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut Malangbong	100%	1 Dokumen	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.100.000

7	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut Malang bong	100%	1 Dokumen	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.100.000
7	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut Malang bong	100%	1 Dokumen	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.100.000
7	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut Malang bong	100%	1 Dokumen	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.100.000
7	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut Malang bong	100%	1 Laporan	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.100.000



										Kecamatan	nya					Kecamatan		
7	0	01	2,0		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>277.352.862</b>				<b>306.088.148</b>		
	1		6									<b>,30</b>				<b>,53</b>		
7	0	01	2,0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	9 item	12 Bulan	6.758.950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	7.434.845
7	0	01	2,0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	2 Item	12 Bulan	117.771.657,30	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	129.548.823,03
7	0	01	2,0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	13 Jnis	12 Bulan	10.770.925	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	11.848.017,50
7	0	01	2,0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	5 Item	12 Bulan	29.690.760	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	32.659.836
7	0	01	2,0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	Kab. Garut	100 %	99 exemplar	12 Bulan	8.129.220	Dana Transfer Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang	100 %	8.942.142

					Perundang-undangan	Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Media Massa	Daerah							- Dana Alokasi Umum		Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan		
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	780 orang	12 Bulan	37.752.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	41.527.200	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	525 Kali	12 Bulan	40.095.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	44.104.500	
7	01	01	2,06	10	Penata Usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penata Usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	26.384.350	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	29.022.785	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>5.565.131.957</b>					<b>6.121.645.153</b>		
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut	100 %	1 unit	12 Bulan	48.017.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	52.818.920	
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan	Jumlah Pengadaan Mebel	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang	Kab. Garut	100 %	3 Item	12 Bulan	309.106.160			Persentase Pemenuhan Urusan	100 %	340.016.776	

						Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Sesuai Kebutuhan	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan		
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut	100 %	3 unit	12 Bulan	37.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	41.250.000
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Luas Tanah Untuk Bangunan Polsek dan Koramil	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut	100 %	4200 M2	12 Bulan	4.770.508.597	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.247.559.456,70
7	01	01	2,07	0	Pengadaan Tanah untuk lahan parkir	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Luas Tanah Untuk Lahan Parkir pasilitasi kenyamanan pelayanan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut	100 %	1 unit	12 Bulan	500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	550.000.000
7	01	01	2,07	11	Pengadaan sarana prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit sarana prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut	100 %	1 Laporan	12 Bulan	400.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	440.000.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>56.591.942</b>				<b>62.251.136,20</b>		
7	01	01	2,02		Penyediaan	Persentase	Jumlah	Jumlah	Kab.	100	36.Kali	12	21.780.000	Dana		Persentase	100 %	23.958.000

	1		8		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Garut	%		Bulan		Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan		
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	100 %	4 Jenis	12 Bulan	10.079.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	11.087.230
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	100 %	28 Orang / Bulan	12 Bulan	24.732.642	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	27.205.906
7	01	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>143.104.665</b>				<b>157.415.131,50</b>		
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	100 %	14 unit	12 Bulan	24.193.345	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	26.612.679,50
7	01	01	2,02		Penyediaan	Persentase	Jumlah	Jumlah	Kab.	100	1 unit	12	20.571.320	Dana		Persentase	100 %	22.628.452



1		9	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Pemenuhan Urusan Penunjang Daerah di Tingkat Kecamatan	Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Garut	%		Bulan		Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pemenuhan Urusan Penunjang Daerah di Tingkat Kecamatan		
7	01	2,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	100 %	3 Unit	12 Bulan	98.340.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	108.174.000
7	01	02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>438.066.420</b>	<b>569.873.062</b>				
7	01	02	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								318.552.370	350.407.607				
7	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring BPNT, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, Penanggulangan COVID-19 dan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut	100 %	5 Kegiatan	12 Bulan	318.552.370	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	350.407.607



					Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	uasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	monitoring /evaluasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	i pembangunan dan pemberdayaan masyarakat					Umum - Dana Alokasi Umum		yang dapat diberdayakan					
7	01	03	2,01	01	Pembinaan Penangann Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Pembinaan Penangann Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penangann Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penangann Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Garut	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	55.000.000			
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>							<b>104.262.400</b>						<b>114.688.640</b>		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>2,01</b>		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>							<b>83.353.930</b>							<b>91.689.323</b>	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut	100 %	1 Laporan	12 Kali	64.653.930	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	71.119.323			
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut	100 %	1 Kegiatan	12 Kali	18.700.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	20.570.000			



					Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut	100 %	1 Tahun	12 Bulan	55.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	60.500.000
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut	100 %	12 Kali	12 Bulan	242.082.643	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	266.290.907,30
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>							<b>190.689.345</b>					<b>209.758.279,50</b>	
7	01	06	2,01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>							<b>190.689.345</b>					<b>209.758.279,50</b>	
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut	100 %	3 Kegiatan	12 Bulan	49.373.940	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	54.311.334
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan	Persentase Dokumentasi Fasilitasi dalam	Jumlah Dokumentasi Fasilitasi	Jumlah Dokumentasi Fasilitasi dalam	Kab. Garut	100 %	1 Kegiatan	12 Bulan	60.000.000	Dana Transfer		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	66.000.000

					Kepala Desa	rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							Umum - Dana Alokasi Umum			
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut	100 %	1 Kegiatan	12 Bulan	31.315.405	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	34.446.945,50	
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen RPTK	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	55.000.000	
<b>TOTAL</b>													<b>9.738.351.729</b>			<b>10.712.186.907,90</b>		

Sumber : Pengolahan Data usulan perencanaan anggaran Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Malangbong pada SIPD Tahun Anggaran 2023

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Kecamatan Malangbong Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 45 (empat puluh lima) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut sebesar Rp. 9.568.351.729,00,- (Sembilan milyar lima ratus enam puluh delapan tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 8.520.068.890,50

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 13.797.240  
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 2.451.513.352,20  
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 12.576.872.  
4. Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 277.352.862,30  
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 5.565.131.957  
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 56.591.942  
7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 143.104.665

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Malangbong.

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 13.797.240,-

Keluaran :

1. Jumlah dokumen Perencanaan Rp. 7.797.240
2. Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp. 1.000.000
3. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp. 1.000.000
4. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp. 1.000.000
5. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp. 1.000.000
6. Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 1.000.000
7. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 1.000.000
8. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Malangbong

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 2.451.513.352,20

Keluaran :

1. Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 2.444.344.102,20
2. Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.



Rp. 7.169.250

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Malangbong

#### 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 12.576.872,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp. 12.576.872,-

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Malangbong

#### 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 277.352.862,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan Rp. 6.758.900,-

2. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan Rp. 117.771.657,30

3. Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan Rp. 10.770.925,-

4. Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan Rp. 29.690.760,-

5. Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa Rp. 8.129.220,-

6. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan Rp. 37.752.000,-

7. Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 40.095.000,-

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Malangbong

### 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 5.565.131.957,-

Keluaran : 1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 48.017.200,-  
2. Jumlah Mebeler yang dibutuhkan Rp. 309.106.160,-  
3. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 37.500.000,-  
4. Jumlah Tanah dan Gedung Kantor Polsek/Koramil atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan Rp. 4.770.508.597,-  
5. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 400.000.000

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Malangbong

### 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 56.591.942,-

Keluaran : 1. Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan Rp. 21.780.000,-  
2. Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan Rp. 10.079.300  
3. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan Rp. 24.732.642,-

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Malangbong

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 143.104.665,-

Keluaran : 1. Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan Rp. 24.193.345,-

2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara yang dibayarkan Pajak dan Perizinannya Rp. 20.571.320,-

3. Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan Rp. 98.340.000,-

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Malangbong

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 438.066.420,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp. 318.552.370,-

2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Rp. 199.514.050,-

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82,20 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Malangbong

2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat

#### Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 318.552.370,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan (MTQ), Fasilitasi Kegiatan olahraga (Porkab), Penanggulangan COVID-19 dan BPNT Rp. 318.552.370,-

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82,20 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Malangbong

#### 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan

Capaian Program : Jumlah penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilakukan di Kecamatan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 154.514.050,-

Keluaran : 1. Jumlah penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilakukan di Kecamatan Rp. 24.514.050,-  
2. Jumlah Pengelolaan sampah di kecamatan Rp. 130.000.000,-

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82,20 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Malangbong

### 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 84.915.100,-

Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 85%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Malangbong

#### 3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1

Laporan

- Masukan : Jumlah Dana Rp. 84.915.100,-
- Keluaran : 1. Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa Rp. 34.915.100,-  
2. Jumlah Dokumen Pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan Rp. 50.000.000,-
- Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 85%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Malangbong

**4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

- Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 104.262.400,-
- Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 83.353.930,-  
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Rp. 20.908.470,-
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 7,88
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Malangbong

**4.1 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

- Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 83.353.930,-
- Keluaran : 1. Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergitas dengan TNI/POLRI Rp. 64.653.930,-  
2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan Tokoh agama Rp. 18.700.000,-
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 7,88
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Malangbong.

#### 4.2 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 20.908.470,-
- Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada Rp. 20.908.470,-
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 7,88
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Malangbong.

### 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 320.349.573,50
- Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 7,88
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Malangbong

#### 5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Capaian Program : Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 320.349.573,50
- Keluaran : 1. Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Rp. 23.266.930,50
2. Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Rp. 55.000.000,-
3. Jumlah kegiatan forum koordinasi Pimpinan di

Kecamatan Rp. 242.082.643,-

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 7,88

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Malangbong.

## **6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 190.689.345,-

Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 7,88

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Malangbong.

### **6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Capaian Program : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 190.689.345,-

Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Rp. 49.373.940,-  
2. Jumlah Dokumentasi Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rp. 60.000.000,-  
3. Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan Rp. 31.315.405,-  
4. Jumlah dokumen RPTK Rp. 50.000.000,-

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 7,88

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Malangbon

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 9.568.351.729,- (Sembilan Milyar Lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah)

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah yang di imlementasikan ke dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Malangbong. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan.



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Garut  
Tahun 2023**

**Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Malangbong**

**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Malangbong**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/  Pagu Indikatif (Rp.)			
						Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	1				<b>KECAMATAN</b>					9,259,245,569			10,384,956,126				
7	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					8,210,962,730			9,231,845,003				
7	1	1	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					13,797,240			15,176,964				
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Malangbong	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	7,797,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	8,576,964
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Malangbong	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Perencanaan, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1,100,000

7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1,100,000
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1,100,000
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1,100,000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1,100,000

7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1,100,000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									<b>2,451,513,352</b>		<b>2,696,664,687</b>		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	22 orang/bulan	100 Persen	2,444,344,102	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2,688,778,512
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	7,169,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	7,886,175
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									<b>12,576,872</b>		<b>13,834,559</b>		
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	32 Stel	100 Persen	12,576,872	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	13,834,559
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									<b>277,352,862</b>		<b>305,124,149</b>		

7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penata Usahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	1 Laporan	1 Dokumen	6,758,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7,434,845
						Penata usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD				1 Dokumen						Penata usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penata Usahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	1 Paket	1 Dokumen	117,771,657	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	129,584,823
						Penata usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD				1 Dokumen						Penata usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penata Usahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	1 Paket	1 Dokumen	10,770,925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	11,848,018
						Penata usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD				1 Dokumen						Penata usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penata Usahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	1 Paket	1 Dokumen	29,690,760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	32,659,836

						Penata usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD									Penata usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penata Usahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	8,129,220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	8,942,142
						Penata usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD				1 Dokumen					Penata usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen	
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Penata Usahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	1 Laporan	1 Dokumen	37,752,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	41,527,200
						Penata usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD				1 Dokumen					Penata usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penata Usahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	1 Laporan	1 Dokumen	40,095,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	44,104,500
						Penata usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD				1 Dokumen					Penata usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen	

7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	26,384,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	29,022,785
						Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD				1 Dokumen					Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>5,256,025,797</b>				<b>5,981,378,376</b>
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	1 Unit	1 Laporan	48,017,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	1 Laporan	52,818,920
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Jumlah Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	3 Unit	1 Laporan	37,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	1 Laporan	41,000,000
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Luas Tanah Untuk Bangunan Polsek dan Koramil, Jumlah unit Gedung Kantor kecamatan, Luas tanah untuk kantor	Jumlah Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	3 Unit	1 Laporan	4,770,508,597	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	1 Laporan	5,447,559,456

7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	1 Unit	1 Laporan	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	1 Laporan	440,000,000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>56,591,942</b>		<b>62,251,136</b>		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pelaksanaan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	21,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	23,958,000
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	10,079,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	11,087,230
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	24,732,642	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	27,205,906
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>143,104,665</b>		<b>157,415,132</b>		

7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	14 Unit	100 Persen	24,193,345	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	26,612,680
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	1 Unit	100 Persen	20,571,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	22,628,452
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	3 Unit	100 Persen	98,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	108,174,000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>							<b>348,066,420</b>			<b>382,873,062</b>		
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>							<b>193,552,370</b>			<b>212,907,607</b>		
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	5 Kegiatan	1 Laporan	193,552,370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	1 Laporan	212,907,607
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>							<b>154,514,050</b>			<b>169,965,455</b>		



7	1	2	2.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Prosentase pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Prosentase pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	3 Dokumen	100 Persen	24,514,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	26,965,455
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	143,000,000
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>							<b>84,915,100</b>			<b>93,406,610</b>		
7	1	3	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>							<b>34,915,100</b>			<b>38,406,610</b>		
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	34,915,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	1 Laporan	38,406,610
7	1	3	2.05		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>							<b>50,000,000</b>			<b>55,000,000</b>		

7	1	3	2.05	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Presentase terpenuhinya a transisi Pandemi Covid-19 menuju Endemi Covid-19	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	100 Persen	1 Dokumen	1 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase terpenuhinya transisi Pandemi Covid-19 menuju Endemi Covid-19	100 Persen	55,000,000
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>							<b>104,262,400</b>		<b>114,688,640</b>			
7	1	4	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>							<b>83,353,930</b>		<b>91,689,323</b>			
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	64,653,930	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	71,119,323
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	18,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	20,570,000

7	1	4	2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>								<b>20,908,470</b>				<b>22,999,317</b>	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Kegiatan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Kegiatan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20,908,470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Kegiatan Penegakan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	22,999,317
7	1	5		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>								<b>320,349,574</b>				<b>352,384,531</b>	
7	1	5	2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>								<b>320,349,574</b>				<b>352,384,531</b>	

7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan Urusan pemerintah Umum yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan Urusan pemerintah Umum yang dilimpahkan kepada Camat	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	24 Orang	1 Laporan	23,266,931	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan Urusan pemerintah Umum yang dilimpahkan kepada Camat	1 Laporan	25,593,624
7	1	5	2.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan Urusan pemerintah Umum yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan Urusan pemerintah Umum yang dilimpahkan kepada Camat	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	3 Orang	1 Laporan	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan Urusan pemerintah Umum yang dilimpahkan kepada Camat	1 Laporan	60,500,000

7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan Urusan pemerintah Umum yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan Urusan pemerintah Umum yang dilimpahkan kepada Camat	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	242,082,643	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan Urusan pemerintah Umum yang dilimpahkan kepada Camat	1 Laporan	266,290,907
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>							<b>190,689,345</b>				<b>209,758,280</b>	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2.01</b>		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>							<b>190,689,345</b>				<b>209,758,280</b>	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	49,373,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	54,311,334
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	66,000,000

7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	31,315,405	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	34,446,946
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Malangbong, Malangbong	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	55,000,000
<b>TOTAL</b>													<b>9,259,245,569</b>		<b>10,384,956,126</b>		

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renja Kecamatan Malangbong mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja Kecamatan Malangbong menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Malangbong akan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**